

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar dan Grafik	ix
Daftar Tabel	ix
Intisari	xii
Abstract	xiii
BAB I Latar Belakang Masalah	1
1.1 Deskripsi Situasi Masalah	1
1.2 Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Pemberian Fasilitas Kepabeanan Terhadap Barang-Barang Penanganan Pandemi COVID-19 Di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	13
BAB II Lingkup dan Ragam Masalah	24
2.1 Gambaran Umum Kinerja Kebijakan Relaksasi Fiskal dalam Penerimaan Bea Masuk KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta pada Tahun 2020	24
2.1.1 Efektivitas	32
2.1.2 Efisiensi	36
2.1.3 Pemerataan	40
2.1.4 Kecukupan	42
2.1.5 Responsivitas	42
2.1.6 Ketepatan	44
2.2 Gambaran Umum Mengenai Situasi Masalah	45
2.3 Kebutuhan akan Analisis	49
2.4 Metode Penelitian	50
2.4.1 Desain Penelitian	50
2.4.2 Penentuan Narasumber	54
2.4.3 Teknik Pengumpulan Data	55
2.4.4 Validitas Data	56



2.4.5 Teknik Analisis Data.....	57
2.4.6 Pengambilan Keputusan	60
BAB III Pernyataan Masalah	62
3.1 Definisi Masalah	62
3.1.1 Proses Manajemen di KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta	63
3.1.1.1 Fungsi Perencanaan (<i>Planning</i>)	69
3.1.1.2 Fungsi Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	72
3.1.1.3 Fungsi Pengarahan (<i>Actuating</i>).....	76
3.1.1.4 Fungsi Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	80
3.1.2 Perumusan Masalah	90
3.1.2.1 Penurunan Jumlah Penerbangan Internasional.....	91
3.1.2.2 Penurunan Volume Impor Umum	96
3.1.2.3 Meningkatnya Nilai Pabean yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk	102
3.1.2.4 Adanya Dugaan Kebocoran Penerimaan Bea Masuk di Sektor Barang Kiriman	105
3.1.2.5 Adanya Praktik Pungutan Liar kepada Pengguna Jasa	109
3.1.2.6 Upaya Pengawasan Kepatuhan Internal Belum Berhasil dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	113
3.1.2.7 Perumusan Masalah Kebijakan dengan Metode Analisis Hierarkis .	118
3.2 Pelaku Utama.....	120
3.3 Ukuran Efektivitas, Tujuan, dan Sasaran	121
BAB IV Alternatif Kebijakan	124
4.1 Deskripsi Alternatif	124
4.1.1 Pelaksanaan 5 Kegiatan Utama Pengawasan Internal, Pembangunan Zona Integritas, dan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 sebagai <i>Status Quo</i>	127
4.1.2 Pemberian <i>Reward</i> Terhadap <i>Whistleblower</i>	134
4.1.3 Pemutasian Pegawai secara Berkala	137
4.2 Perbandingan Konsekuensi Kebijakan.....	139
4.2.1 Konsekuensi Kebijakan <i>Status Quo</i>	140
4.2.2 Konsekuensi Kebijakan Pemberian <i>Reward</i> Terhadap <i>Whistleblower</i>	142



4.2.3	Konsekuensi Kebijakan Pemutasian Pegawai secara Berkala	143
4.3	Dampak Ganda dan Eksternalitas.....	144
4.4	Hambatan dan Fisibilitas Politik.....	145
BAB V Rekomendasi Kebijakan		148
5.1	Kriteria Alternatif Rekomendasi.....	149
5.1.1	<i>Technical Feasibility</i>	149
5.1.2	<i>Economic and Finance Feasibility</i>	151
5.1.3	<i>Political Viability</i>	152
5.1.4	<i>Administrative Operatibility</i>	155
5.2	Deskripsi Alternatif yang Dipilih	156
5.3	Kerangka Strategi Implementasi	159
5.4	Penyediaan Pemantauan Evaluasi.....	160
5.5	Keterbatasan dan Konsekuensi yang Tidak Terantisipasi.....	161
DAFTAR PUSTAKA		162
LAMPIRAN 1: Transkrip Wawancara		L-1
LAMPIRAN 2: Surat Izin Penelitian		L-19

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1. Diagram Alir Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Sesuai SOP-92/KPU.03/2020	16
Gambar 2. Mekanisme Pengaturan Tarif Pajak Terhadap PDB	25
Gambar 3. Diagram Alir Analisis Kebijakan	52
Gambar 4. Kerangka Berpikir Penyusunan Naskah Kebijakan	58
Gambar 5. Peta Strategi KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	68
Gambar 6. Pohon Masalah Kebijakan	119
Gambar 7.1 Hubungan Asumsi-Asumsi dan Prediksi yang Dihasilkan.....	141
Gambar 7.2 Hubungan Asumsi-Asumsi dan Prediksi yang Dihasilkan.....	142
Gambar 7.3 Hubungan Asumsi-Asumsi dan Prediksi yang Dihasilkan.....	144
Grafik 1. Masa Kerja Pelaku Praktik Korupsi	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Proporsi APBN di Masa Pandemi COVID-19 (Dalam Miliar Rupiah)	6
Tabel 2. Perkembangan Kontribusi Bea Masuk Terhadap Penerimaan Sektor Perpajakan	8
Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dan Kontribusi Terhadap Penerimaan Bea Masuk secara Nasional	10
Tabel 4. Kantor Pelayanan Pabean Pemasukkan Barang Penanganan COVID-19	15
Tabel 5. Data-Data yang Diperiksa oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev)	19
Tabel 6. Hasil-Hasil Keluaran dari Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Melalui Skema PMK 34 tahun 2020 dan PMK 188 Tahun 2020	20
Tabel 7. Profil Komoditas yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Melalui Skema PMK 34 tahun 2020 Melalui KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	21
Tabel 8. Indikator Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi COVID-19.....	33
Tabel 9. Aksi Kebijakan, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Pelaksanaan PMK nomor 34 tahun 2020 dan PMK nomor 188 tahun 2020 di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	35
Tabel 10. Perhitungan Biaya dan Manfaat Kebijakan Pembebasan Bea Masuk Untuk Komoditas Penanganan Pandemi COVID-19	37
Tabel 11. Nilai Impor dan Ekspor Nasional dalam Periode 5 Tahun Terakhir (dalam Miliar Dollar)	47
Tabel 12. Program dan Pagu Anggaran KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta tahun 2021 (dalam ribuan rupiah)	70
Tabel 13. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta tahun 2021.....	81
Tabel 14. Penilaian Kinerja Sasaran Strategis (SS) KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta tahun 2021	89



Tabel 15. Jumlah Penerbangan Internasional dan Penumpang yang dilayani di Bandara Internasional Soekarno-Hatta	94
Tabel 16. Jumlah Barang Impor yang dilayani di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (dalam ton)	96
Tabel 17. Jumlah Dokumen PIB di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	98
Tabel 18. Jumlah Nilai Pabean di KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta.....	101
Tabel 19. Jumlah Nilai Pabean yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk di KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta	104
Tabel 20. Penerimaan Bea Masuk Impor Barang Kiriman KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta (dalam Milyar Rupiah)	106
Tabel 21. Perbedaan Tujuan dan Sasaran Kebijakan	122
Tabel 22. Tahap, komponen, dan Unsur Pelaksanaan ISO 37001: 2016	132
Tabel 23. Matriks Scorecard Alternatif- Alternatif Kebijakan	157